

Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Wevi Oktaria Yuti¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
wevioktariayuti@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : 26 March, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Gender mainstreaming is a strategy to achieve gender equality and justice through policies and programs that take into account the experiences, aspirations, needs and problems of women and men in the process of planning, implementing, monitoring and evaluating all policies and programs in various areas of life and sectors. development. The implementation of this gender mainstreaming program is one of the programs of the Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Agency. This research aims to identify and explain the implementation and analyze obstacles in implementing the gender mainstreaming program at the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service of Pekanbaru City. The method used is a descriptive survey with quantitative methods. Based on the results of research at the Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service, the implementation of the PUG program has not been fully implemented. Limited budget for implementing the gender mainstreaming program by the Pekanbaru City DP3APM Service and inadequate human resources at the Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service.

Keywords: *Implementation, Gender Mainstreaming and Women's Empowerment*

Abstrak

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan proram diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Pelaksanaan program pengarusutamaan gender ini salah satu program dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan program PUG belum semua terlaksanakan. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender oleh Dinas DP3APM Kota Pekanbaru dan belum memadai sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*

Pendahuluan

Menurut Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, setiap instansi pemerintah mengintegrasikan gender sebagai suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini setiap lembaga dan satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional responsive gender.

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting karena dalam kehidupan sosial, seringkali ditemui permasalahan mengenai isu gender yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimbangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak yaitu perempuan dan laki-laki. Hal ini tentunya dapat menyebabkan akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan akan terciptanya kondisi yang tidak adil gender. Maka dari itu, dipandang perlu dalam menangani gender memerlukan sebuah alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel baik bagi pihak perempuan atau laki-laki yaitu berupa PUG.

Penelitian ini dianggap penting diteliti karena belum adanya monitoring dan evaluasi dari Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap program-program yang dijalankan. Dalam membuat urgensi alam penelitian mekanisme kerja pelaksanaan itu yang selama ini berjalan di kota Pekanbaru masih perlu penyempurnaan terutama pada tahap perencanaan jadi hal tersebut menjadi sebuah urgensi.

Adapun tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru dan Menganalisa dan menjelaskan hambatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru.

Adapun program yang ada di dinas DP3APM untuk penelitian ini adalah Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki 3 kegiatan yaitu (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota. (3) Pengutan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota. Namun, dari 9(sembilan) sub kegiatan diatas hanya terfokus pada sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota karena terbatasnya anggaran pada program pengarusutamaan gender dan masih belum memadai sumber daya manusia pada bidang pengarusutamaan gender.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Pekanbaru, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlingan khusus anak, meningkatkan

kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan meningkatkannya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan jelas merupakan sebuah upaya besar yang memerlukan banyak biaya maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait baik di pusat dan di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ini memerlukan anggaran dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Anggaran dana tersebut menjadi tanggung jawab antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, anggaran dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain anggaran, dalam program dan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat mendukung dari program kegiatan pengarusutamaan gender agar terlaksana dengan optimal. Maka dari itu, dapat dilihat dari data pegawai di DP3APM Kota Pekanbaru pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Fenomena dan permasalahan ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian, maka adapun permasalahan dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis menduga bahwa masih terbatasnya anggaran dalam Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
2. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis menduga bahwa sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan masih belum memadai.

Mekanisme kerja pelaksanaan PUG yang selama ini berjalan di Kota Pekanbaru masih perlu penyempurnaan terutama pada tahap perencanaan. Hal ini menjadi urgensi dalam penelitian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program PUG yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang diperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program pembangunan baik pada aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Gender merupakan sifat dan karakteristik seseorang yang membedakan laki-laki dan perempuan mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender juga diartikan sebagai cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis.

Pelaksanaan dalam pendekatan yang menggunakan teori dari Van Metter dan Carl Van Horn Implementasi kebijakan publik mengatakan proses implementasi kebijakan sebuah abstraksi atau performansi suatu Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Yang dimana indikator Variabel Pelaksanan yang sangat menentukan keberhasilan Pelaksanaan, yaitu :

- a. Standar Dan Sasaran Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
- b. Sumber Daya Keberhasilan proses implelementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu
- c. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan oganisasi informal yang akan terlibat pengimpelementasikan kebijakan publik, merupakan sangat penting karena kinerja impelementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tetap serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.
- d. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses impelementasi.
- e. Lingkungan, Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna meninal kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Carl Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan.

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, kuisisioner dan data sekunder diperoleh dari buku, data, dokumen publikasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi.

Setelah keseluruhan data terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data di kelompokkan dan di sesuaikan menurut jenis data yang di peroleh, kemudian akan dibahas dan di analisa dalam dua bentuk, yaitu data yang bersifat kualitatif akan di uraikan secara lengkap dan terperinci dalam bentuk kalimat. Kemudian data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan atau disajikan dalam

bentuk tabel, angka, persentase serta dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan induktif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian didapatkan rekapitulasi dari penelitian Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Tanggapan Responden dinas Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Standar dan sasaran	4 (67%)	2 (33%)	0 (0%)	6 (100%)
2.	Sumber Daya	1 (17%)	4 (66%)	1 (17%)	6 (100%)
3.	Karakteristik pelaksana	3 (50%)	3 (50%)	0 (0%)	6 (100%)
4.	Komunikasi antar organisasi	5 (83%)	1 (17%)	0 (0%)	6 (100%)
5.	Lingkungan sosial dan ekonomi	1 (17%)	5 (83%)	0 (0%)	6 (100%)
Jumlah		14	15	1	30
Rata-rata		2,8	3	0,2	6
Presentase		47%	50%	3%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data olahan hasil penelitian,2023

Dari hasil rekapitulasi yang dibuat penelitian didapatkan kesimpulan yang dilihat dari hasil kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa jawaban rata-rata keseluruhan dari

indikator responden dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Indikator standar dan sasaran kebijakan, dilihat dari penyebaran kuesioner kepada pihak dinas rata-rata menjawab berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan pihak dinas sedang mengatasi jumlah pengurangan kasus kekerasan gender.

Indikator sumberdaya, dilihat dari penyebaran kuisisioner kepada pihak dinas rata-rata jawaban berada pada kategori “Cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia masih kurang, ketersediaan dana yang setiap tahunnya ada pengurangan sehingga program yang dibuat masih ada yang tidak terlaksana, hal tersebut sangat menghambat dalam perjalanan program sehingga semua serba minim sehingga tidak dapat mengcover keseluruhan dari program tersebut khususnya di Kota Pekanbaru.

Indikator karakteristik pelaksana, dilihat dari penyebaran kuisisioner kepada pihak dinas rata-rata jawaban untuk indikator ini adalah “Cukup Terlaksana”. Karena dalam menjalankan program ini pihak dinas sudah mulai menjalankan tugas nya sebagai fungsi nya sebagai fasilitator penyelesaian masalah dan tetap adanya transparansi yang jelas.

Indikator komunikasi antar organisasi, dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner kepada pihak dinas di dapati rata-rata jawabannya berada pada kategori “Cukup Terlaksana” karena komunikasi antar organisasi lain sudah baik.

Indikator lingkungan sosial dan ekonomi, dari hasil penyebaran kuisisioner terhadap pihak dinas menghasilkan jawaban dengan rata-rata “Cukup Terlaksan”. Karena dilihat dari hubungan pihak pelaksana dan masyarakat sudah mulai terjalin dengan baik dan untuk pengaruh terhadap ekonomi masyarakat juga berpengaruh.

Dengan begitu jawaban responden pada Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dominan menjawab “Cukup Terlaksana” berada pada skala pengukuran 34-66% pada Kriteria Cukup Terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan dari alasan jawaban responden yang telah dijelaskan Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dikota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yaitu Cukup Terlaksana. Upaya yang dilakukan DP3APM dalam upaya penambahan sumber daya belum berjalan optimal karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Masih belum memadai anggaran pada Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG). Sosialisasi yang dilakukan DP3APM belum menyeluruh banyak masyarakat yang belum paham tentang program tersebut dan tentang mau mendampingi pelapor jika terjadi kekerasan berbasis gender yang dialami korban.sosialisasi sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham pada program dan kegiatan yang diberikan DP3APM.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi responden pihak masyarakat korban kekerasan gender tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Standar dan sasaran	4 (18%)	10 (46%)	8 (36%)	22 (100%)
2.	Sumber Daya	3 (14%)	12 (54%)	7 (32%)	22 (100%)
3.	Karakteristik pelaksana	3 (14%)	14 (64%)	5 (22%)	22 (100%)
4.	Komunikasi antar organisasi	6 (27%)	14 (64%)	2 (9%)	22 (100%)
5.	Lingkungan sosial dan ekonomi	9 (41%)	11 (50%)	2 (9%)	22 (100%)
Jumlah		25	61	24	30
Rata-rata		5	2,2	4,8	22
Presentase		23%	55%	22%	100%
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil responden dari masyarakat korban kekerasan gender tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru untuk rata-rata jawaban berada pada kategori "Cukup Terlaksana".

Untuk indikator standar dan sasaran kebijakan dilihat dari hasil penyebaran kuisisioner, jawaban rata-rata berada pada "Cukup Terlaksana" dengan jumlah 48%. Hal ini karena pihak masyarakat korban kekerasan belum mengikuti standar operasional yang dibuat oleh pihak dinas.

Indikator sumber daya, untuk rata-rata jawabannya berada "Cukup terlaksana" dengan jumlah 54%. Karena untuk dana kurang merata ada beberapa yang tidak mendapati dana dan untuk jumlah petugas pelaksanaanya juga masih kurang.

Untuk indikator karakteristik pelaksana rata-rata jawaban berada pada “Cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa telah mendapatkan perhatian dan penyelesaian masalah dari pihak pelaksana sudah mulai terhandle.

Indikator lingkungan sosial dan ekonomi dari hasil kuisioner diperoleh jawaban rata-rata “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 50%. Program ini sudah mulai berpengaruh terhadap masyarakat korban kekerasan gender.

Berdasarkan analisa hasil kuisioner peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran presentase serta berdasarkan analisa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata 12,2 dengan presentase 55%. Namun masih belum maksimal secara keseluruhan dan dapat diartikan bahwa dalam Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sudah cukup terlaksana tetapi masih perlu memaksimalkan lagi.

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terkait program pengarusutamaan gender ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya program pengarusutamaan gender ini tentunya disambut baik dengan masyarakat penerima program. Dampak yang ingin dihadirkan tentu merupakan dampak positif karena melalui program pengarusutamaan gender ini sudah pasti harapannya adalah dapat mengurangi jumlah kekerasan gender, dapat memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan gender dan untuk pengetahuan penerima program yang tidak mengetahui apa itu program pengarusutamaan gender.

Namun masih dapat kekurangan dalam pelaksanaan program ini terkhusus dari segi sumberdaya manusia karena sama-sama diketahui untuk jumlah dari pihak pelaksana masih sangat kurang.

Dari segi sarana dan prasarana pendukung terkesan masih kurang memadai ada beberapa hal yang didapati oleh peneliti pada saat melihat langsung kelokasi karena dari salah satu korban yang saya wawancarai masih ada yang belum mendapat fasilitas yang lengkap hal ini juga karena terbatasnya sumber dana.

Kesimpulan

Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa hasil jawaban responden mengenai Pelaksanaan Program Pengarusutamaan (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan hasil “Cukup Terlaksana”. Berdasarkan 5 indikator yang ada yaitu, standar dan sasaran, sumberdaya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi, namun secara keseluruhan masih terdapat kegiatan-kegiatan pelaksana yang belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan indikator yang ada. Salah satunya adalah indikator sumberdaya, dimana yang di katakan oleh kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kepala UPT jumlah sumberdaya manusia yang memantau dan mendukung pelaksanaan program tersebut masih terbatas, selain itu sarana dan prasarana juga belum memadai dan anggaran dari setiap program PUG ini terbatas. Dari itu penulis dapat menarik kesimpulan dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender berdasarkan per indikatornya.

1. Indikator standar dan sasaran ini "Terlaksana". Karena dalam melaksanakan program dan kegiatan sudah menjalankan sesuai SOP dengan maksimal.
2. Indikator sumber daya untuk menjawabnya berada pada kategori "Cukup Terlaksana" karena masih terbatasnya sumberdaya, anggaran, sarana dan prasarana untuk pihak pelaksananya.
3. Indikator karakteristik pelaksana untuk menjawab rata-rata jawaban berada pada "Cukup Terlaksana" karena dalam menjalankan program ini pihak dinas sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator namun di dalam penyelesaian sebuah masalah belum adanya sikap komitmen.
4. Indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori "Cukup Terlaksana" karena adanya hubungan baik dalam instansi sendiri maupun instansi lain. Namun masih terbatasnya komunikasi instansi dengan masyarakat.
5. Indikator lingkungan sosial dan ekonomi berada pada kategori "Cukup Terlaksana" yang dimana sesuai fakta lapangan bahwa program pengarusutamaan gender ini belum melakukan upaya dalam pelaksanaan kegiatan sebagian pengaruh program terhadap masyarakat belum merasakan.

Dilihat dari hasil kesimpulan diatas yaitu jawaban pada kategori "Cukup Terlaksana". Semua sudah berjalan dengan efektif dan efisien namun ada beberapa indikator yang masih belum terlaksana maka Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) ini belum bisa dikatakan terlaksana secara efektif.

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru ini sebagai berikut.

1. Penulis menyarankan pihak DP3APM melakukan penambahan pegawai agar kebijakan berjalan secara efektif dan efisien agar tidak ada tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan.
2. Penulis menyarankan dan berharap bahwa jumlah anggaran dalam perencanaan lebih ditingkatkan lagi dan tidak hanya memprioritaskan beberapa kegiatan saja di dalam program PUG ini.
3. Penulis menyarankan, diharapkan pihak DP3APM khususnya di bidang PUG melakukan sosialisasi atau pun kegiatan-kegiatan lainnya secara rutin sesuai ketetapan waktu dan melaksanakan kegiatan menyeluruh pada Kota Pekanbaru

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Abdul Wahab, Solichin. (2014) Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:Paragonatama Jaya.
- Ali, Faried,. Alam, Andi Syamsu,. & Wantu, Sastro M (2012) Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Anggara, s.(2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

- Akhmad Fauzi, A. O. (2014). Pengukuran-Pembangunan-Berkelanjutan-Di Indonesia.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2014). Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Badan Pusat Statistik, 1–172.
- Bappenas. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial, Edisi II.
- BPS Riau, T. C. (2019). Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau 2019.
- Darwin, Muhadjir M., 2005. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana.
- Dr. H. Tachjan, M. S. (2006). Implementasi Kebijakan Publik.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024).

PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of

Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods

in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Firman, H. A., & Rahmiati. (2020). Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah.
- Hamdi, Muchlis. (2015) *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2012) *Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2015) *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pasolong, H.(2018). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Paradila, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah Di Bidang Perencanaan Pada Pemerintah. Provinsi Sumatera Utara.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Harun, A. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan. *Jurnal Trias Politika*, 1 (1), 1–24.
- Nasrullah, I. D. (2021). Pengarusutamaan Gender di Jepang Untuk Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals) dalam Perspektif Feminisme Liberal. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 1(2), 132.
- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Sebagai Salah Satu Strategi Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Setiap Instansi Pemerintah Mengintegrasikan Gender Sebagai Suatu Dimensi Integral Dari Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Atas Kebijakan Dan Program Pembangunan Nasional.
- Renja (Rencana Kinerja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2022.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2022.